

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN

Diwayana Putri Nasution, Muhammad Toyib Daulay, Epi Handani
Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: diwayanaputri@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine government expenditure in the health and education sectors on economic growth through the human development index as an intervening variable. This study uses path analysis tools and time series data from 2010 to 2017 which are processed with the SPSS 16 application. This research uses descriptive and quantitative analysis methods. Public health sector expenditure is 0.322 smaller than the value of the indirect effect of 1.14, which means that government spending in the health sector has a significant effect on Economic Growth through the Human Development Index as an intervening variable in Medan City. The results of the second analysis show that the Education Sector Government Expenditure is 0.626 greater than the value of the indirect effect of 0.116, meaning that the Education Sector Government Expenditure has no effect on Economic Growth through the Human Development Index as an intervening variable in Medan City.

Keywords: Health Sector Government Expenditure, Economic Growth Sector and Human Development Index.

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian tercermin dari hasil pembangunan, dimana pembangunan harus dilakukan dalam tujuan untuk mengentaskan pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan salah satunya adalah dalam perbaikan pendapatan per kapita masyarakat dan perbaikan di berbagai sektor bidang usaha. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) riil di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi secara umum biasanya diukur dari peningkatan Produksi Domestik Regional Bruto dari suatu daerah atau negara yang menjadikan objek penelitian. Cara lain adalah dengan melihat perbaikan pendapatan per kapita, dimana yang dilakukan secara makro adalah dengan cara mengusahakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari hasil Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai sektor lapangan usaha, baik sektor basis atau unggulan maupun sektor non basis ataupun atas sektor konsumsi, investasi, net perdagangan internasional dan pemerintah dengan memicu peningkatan output usaha namun juga sebaiknya disertai dengan penurunan tingkat pengangguran juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yg sedang terjadi. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang harus ada di dalam pembangunan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi diharapkan harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, dengan demikian peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya ataupun dengan campur tangan pemerintah harus dapat dinikmati masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan suatu ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk semakin bertambah. Bertambahnya penduduk tersebut ini berarti akan menyebabkan angkatan kerja juga selalu meningkat pula. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan perkerjaan oleh angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, lapangan usaha menciptakan pemerataan ekonomi melalui retribusi pendapatan yang akan lebih tercapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi dalam tahap pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Karena penduduk mengalami peningkatan dan berarti pula kebutuhan ekonomi juga akan bertambah. Oleh sebab itu bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau disebut PDRB atas dasar konstan setiap tahun. Jadi dalam arti ekonomi makro pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDRB atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup meningkat dalam segi ekonomi merupakan cerminan dari tingkat pendapatan masyarakat supaya lebih baik di daerah tersebut, sedangkan dalam bidang non ekonomi peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup dan aspek lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto secara agregatif menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Dari data yang ada dalam publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dapat dilihat beberapa series data tentang laju pertumbuhan ekonomi baik secara berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi terdapat dua macam yang pertama laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku dan kedua laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan.

Secara terperinci data laju pertumbuhan PDRB Kota Medan dari tahun 2010-2017 terdapat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2010-2017 Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)

Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB adhk 2010 (Persen)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.32	-2.95	0.79	1.09	6.39	5.01	3.96	6.31
B. Pertambangan dan Penggalian	-3.46	-1.28	-5.16	-3	-5.01	-4.40	-2.73	-2.68
C. Industri Pengolahan	3.23	5.71	3.69	1.93	2.39	1.59	4.90	1.90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.39	13.44	-7.33	-16.73	2.45	-10.12	11.04	9.54
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	4.11	3.78	4	3.86	6.67	8.01	6.42	9.96
F. Konstruksi	7.49	9.60	8.92	8.43	8.95	8.09	8.05	7.16
G. Perdagangan Besar dan Eceran,	9.59	6.88	8.82	8.64	9.34	6.54	6.53	6.38
H. Transportasi dan Pergudangan	5.76	8.27	8.47	-11.76	-11.92	3.46	6.46	7.94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	7.01	11.20	8.63	6.55	9.63	8.63	6.04	6.81
J. Informasi dan Komunikasi	6.87	9.63	9.84	9.93	9.55	3.83	7.35	8.85
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.53	8.61	7.41	6.98	4.78	5.57	3.89	0.48
L. Real Estate	7.83	8.55	8.20	8.04	8.70	7.51	5.02	7.74
M,N. Jasa Perusahaan	5.99	9.47	6.14	6.78	6.66	4.94	6.65	7.95
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib	12.94	11.95	10.65	7.29	7.09	3.32	2.19	2.56
P. Jasa Pendidikan	5.52	5.56	8.46	8.30	8.16	8.54	6.70	4.29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.10	12.26	12.06	9.87	11.81	9.95	9.40	8.46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6.87	6.98	5.91	8.25	8.05	6.97	7.16	8.63
PDRB	7.02	7.79	7.66	5.36	6.07	5.74	6.27	5.81

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Kota Medan atas dasar harga konstan dan dilihat pada total PDRB dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan kemudian tahun berikutnya pada 2012 terjadi penurunan sangat sedikit saja dan tahun berikutnya juga pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi dan tahun berikutnya juga 2014 terjadi kenaikan yang signifikan tahun selanjutnya tahun 2015 mengalami penurunan lagi dan tahun 2016 terjadi mengalami kenaikan dan hingga tahun 2017 terjadi lagi penurunan. Maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan masih atas rata-rata berkisar 5 % dan disimpulkan pertumbuhan ekonomi masih keadaan sangat baik. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Priyo, 2009). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan tingkat dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia itu sendiri dapat dicermati dari besar kecilnya pembangunan manusianya. Apabila pembangunan manusianya mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat akan selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang mencakup seperti usia hidup, pengetahuan dan kehidupan layak. Apabila suatu daerah mampu mengelola IPM dengan baik maka dapat dipastikan sumber daya alam dan manusianya akan dapat bersinergi dengan simultan. Hal ini akan memicu peningkatan daya saing daerah di setiap daerahnya, karena apabila

sumber daya manusia di setiap daerah diberdayakan dengan baik maka otomatis sumber daya manusia tersebut mampu mengolah dan mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Hal ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah mampu memberikan fasilitas dan infrastruktur yang baik sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya masing-masing yang dimana nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi daya saing masyarakat serta daya saing daerah. Indeks Pembangunan Manusia juga dapat dikatakan sebagai variabel yang sangat berpengaruh langsung terhadap daya saing daerah. Seperti penjelasan di atas apabila daerah mampu mengelola indeks pembangunan manusia dan sumber daya manusia yang ada maka otomatis keduanya akan bersinergi dengan baik dan nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah.

Salah satu alat ukur yang lazim digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Pada tahun 1990 *United Nation Development Program* (UNDP) memperkenalkan “*Human Development Index* (HDI)” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Posisi manusia selalu dijadikan tema sentral dalam setiap pembangunan karena selain menjadikan subjek manusia juga menjadi objek sasaran pembangunan tersebut. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator setiap kemajuan suatu negara atau daerah. Suatu negara dikatakan maju tidak bisa hanya dihitung dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) saja tetapi juga dapat dihitung melalui aspek peningkatan angka harapan hidupnya serta dari aspek pendidikan masyarakat itu sendiri. Upaya membuat suatu indikator pencapaian pembangunan manusia harus dapat memberikan dampak atau gambaran tentang dari program pembangunan manusia tersebut.

Pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri terdiri dari tiga pilar, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Karena pengembangan sumber daya manusia memiliki kapasitas yang besar untuk kemajuan suatu negara

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Kedua faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan prioduktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik (Astri dkk, 2013). Indeks Pembangunan Manusia ialah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar bisa dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk pada suatu daerah. Adapun tiga indikator tersebut adalah indikator kesehatan yang dimaksud ialah dengan angka harapan hidup, indikator pendidikan yang dimaksud ialah dengan angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan indikator ekonomi pendapatan (upah) yang dimaksud ialah seberapa besar daya beli masyarakat.

Dengan demikian ada dua sektor yang harus perlu di perhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan masyarakatnya mencapai hidup yang layak yaitu dengan pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan sektor pendidikan, dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri.

Tabel 2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan APBD Kota Medan Tahun 2010-2017 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Sektor Kesehatan (Rp)	Sektor Pendidikan (Rp)	APBD (Rp)
1	2010	294.671.898.434	733.266.652.917	2.582.065.326.653
2	2011	373.568.879.990	983.774.581.356	3.395.728.853.449
3	2012	423.878.270.895	983.289.538.550	4.080.935.662.619
4	2013	389.133.311.196	1.109.133.107.469	4.237.560.638.891
5	2014	495.610.513.080	1.079.853.934.544	4.625.169.942.881
6	2015	627.008.258.405	1.162.361.929.743	5.467.952.757.114
7	2016	691.863.259.661	1.195.515.428.591	5.737.738.289.895
8	2017	615.211.142.256	883.069.743.930	5.554.084.308.979

Sumber: Badan Pusat Stastistik Kota Medan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan kemudian tahun berikutnya tahun 2013 terjadi penurunan tetapi tahun 2014 mengalami kenaikan lagi tahun berikutnya tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi tahun berikutnya tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat dalam. Kemudian dari perkembangan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 perkembangan pengeluaran pemerintah selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan hanya saja tahun 2017 pengeluaran pemerintah mengalami

penurunan. Dan perkembangan APBD Kota Medan dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Melalui APBD tersebut yang diterapkan oleh pemerintah Kota Medan agar anggarannya digunakan sebaik-baiknya dan tepat sasaran dalam pembangunan agar masyarakat merasakannya dalam pembangunan yang tersedia.

Kesehatan merupakan suatu kondisi yang sejahtera dan sehat dari fisik, batin maupun jiwa yang membuat manusia atau seseorang melakukan suatu kegiatan dan akan menghasilkan produktivitas dari kesehatan tersebut. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan kesehatan juga menjadi fundamental untuk membentuk manusia yang lebih baik pada pembangunan kesehatan yang baik juga. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 pasal 171 menyatakan bahwa menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan mutlak di penuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN diluar gaji, sementara Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBN diluar gaji.

Menurut lembaga WHO, kesehatan merupakan keadaan baik sepenuhnya secara fisik, mental, sosial. Kesehatan juga bukanlah karena tidak ada penyakit atau kelemahan dan bukan pula sekedar soal medis semata, melainkan menyangkut keadaan sosial di masyarakat. Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Batasan kesehatan tersebut di atas sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu itu hanya mencakup tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, maka dalam Undang- Undang NO. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) dapat dinyatakan dengan persamaan $Y = AK$. Dimana A mewakili teknologi dan K mewakili modal fisik dan sumber daya manusia. Asumsi yang dapat ditarik dari teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) yaitu bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia dapat menghasilkan ekonomi eksternal dan terciptanya peningkatan produktivitas yang dapat membalikan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah. Di dalam teori pertumbuhan baru (pertumbuhan endogen) menyimpulkan bahwa investasi terhadap modal fisik dan modal manusia memiliki peran dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta mendorong peran aktif dari kebijakan publik dalam memacu pembangunan ekonomi melalui investasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan pengaruhnya dalam perubahan konsumsi maupun pengeluaran untuk investasi publik serta penerimaan pajak (Todaro, 2006 dalam Winarti, 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup pada dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sebetulnya harus dianalisis serta dipahami betul dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report, 1995 : 103*), Konsep pembangunan manusia pada umumnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik maupun mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Menurut Covey (1990) dalam Santoso (2013), bahwa dalam menciptakan manusia yang produktif, kesehatan merupakan hal atau bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Agar kualitas kesehatan masyarakat tetap terjamin pemerintah perlu untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk berbagai keperluan dan hal di bidang kesehatan seperti tenaga medis, obat-obatan, puskesmas dan rumah sakit. Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas kerja dan kapasitas

belajar di sekolah baik pada tingkat individual maupun keluarga. Tenaga kerja akan lebih produktif dalam bekerja ketika mereka sehat secara fisik dan mental dibandingkan mereka yang kurang sehat. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual.

Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara atau suatu daerah. Sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan dengan cukupan secara universal, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk bagi masyarakat. Dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif dan adil bagi masyarakat (Bisma Murti, 2010).

Menurut Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan terdapat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat 2 mengatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 % dari APBD di luar gaji. Sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 % dari APBD di luar gaji. Salah satu sistem kesehatan nasional adalah sistem pembiayaan kesehatan. Jika ditinjau dari sudut definisi kesehatan, sebagaimana yang dimaksud pihak WHO. Maka pembiayaan pembangunan perumahan dan pembiayaan pengadaan pangan yang karena juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan. Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang tanpa adanya kesehatan yang baik dan bugar maka tidak akan masyarakat menjadi produktif. Dalam kehidupan manusia, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat insentif.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Dalam peningkatan sumber daya manusia pendidikan mempunyai peranan penting. Pertumbuhan ekonomi bangsa dipengaruhi secara penuh oleh pendidikan. Pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas dan fertilitas (angka kelahiran) masyarakat. Dengan pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan.

Pada umumnya pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (*human investment*) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Investasi sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih

merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun itu sebuah bimbingan yang diberikan baik individu serta kelompok agar menjadi sosok yang mendapatkan hasil suatu kreativitas maupun sebuah inovasi yang bermanfaat dan berguna pada diri manusia. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, menurut Todaro (2008 : 434) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar. Pendidikan adalah hal yang paling untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga juga, sehingga merupakan hal fundamental untuk membentuk suatu kemampuan manusia itu sendiri dan yang lebih luas pada inti sebuah pembangunan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya pada jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya dengan baik sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi masyarakat dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014 : 41).

Menurut Pasal 1 butir 40 Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas dasar UU No. 22 Tahun 2011 Tentang ABPN 2012, mengatakan bahwa anggaran dalam sektor pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi dalam pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer kedaerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Untuk ingin membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.

Ketersediaan fasilitas pelayanan baik fisik maupun non fisik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di suatu daerah, dalam bidang fisik seperti ketersediaan sarana standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, juga bidang non fisik seperti besar adanya bantuan biaya pendidikan. Pemerintah harus lebih fokus terhadap pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Jika halnya terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 bahwa mengatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

METODE

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan runtun waktu (*time series*). Data sekunder adalah yang diperoleh para peneliti melalui banyak mencari sumber yang sebelumnya sudah ada atau data yang langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2017 (8 tahun).

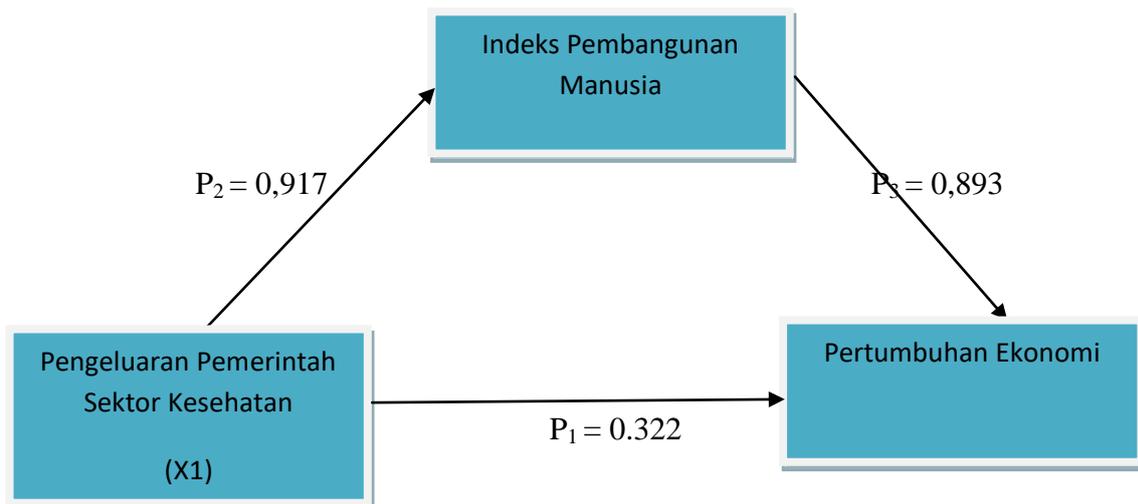
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Path Analysis (analisis jalur). Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan menjadi variabel utama dalam mendukung dari pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia menjadi variabel intervening, dengan persamaan sebagai berikut :

1. Persamaan Pertama
 $Y_1 = \beta_{Y1} X_1 + \beta_{Y1} X_2 + \epsilon_1$
2. Persamaan Kedua
 $Y_2 = \beta_{Y2} X_1 + \beta_{Y2} X_2 + \beta_{Y2} Y_1 + \epsilon_2$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening.



Gambar 1. Path Analysis Persamaan 1

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dapat berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari

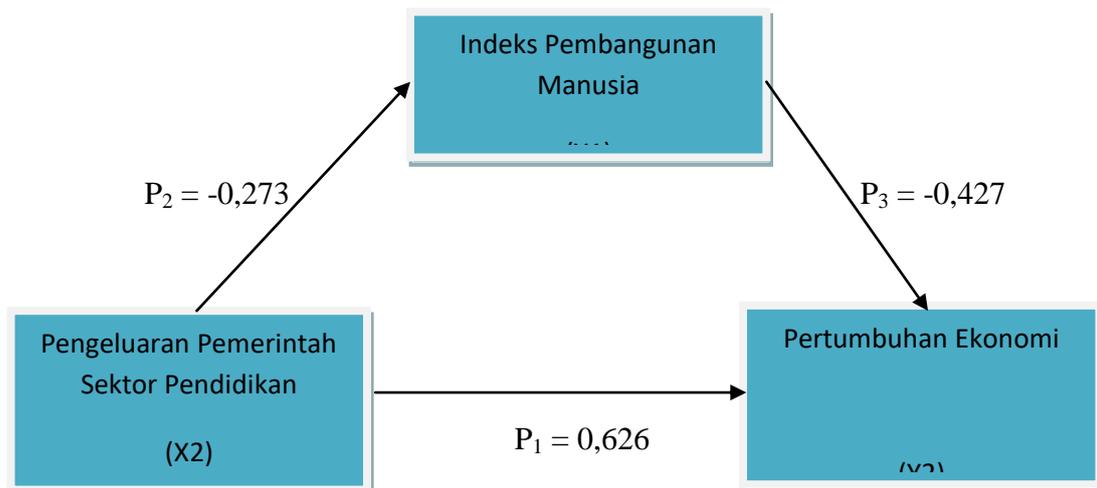
pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Pertumbuhan Ekonomi.

- a. Besarnya Pengaruh langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (P_1) = 0,322
- b. Besarnya pengaruh tidak langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ($P_2 \times P_3$) ($0,917 \times 0,893$) = 0,818
- c. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0,322 + 0,818 = 1,14$
- d. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung (P_1) = 0,322 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung ($P_2 \times P_3$) = 1,14, maka H_a diterima, artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening.

2. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening



Gambar 2. Path Analysis Persamaan 2

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dapat berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan ke Indeks Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) lalu ke Pertumbuhan Ekonomi.

- a. Besarnya Pengaruh langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi ($P1$) = 0,626
- b. Besarnya pengaruh tidak langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu ($P2 \times P3$) $(-0,273) \times (-0,427) = 0,116$
- c. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = $0,626 + 0,116 = 0,742$
- d. Kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan :

Nilai pengaruh langsung ($P1$) = 0,626 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung ($P2 \times P3$) = 0,116, maka H_a ditolak, artinya Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak menjadi variabel yang memediasi/intervening antara Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka Indeks Pembangunan Manusia tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening

Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, dengan keadaan badan yang sehat manusia bisa melakukan beraktivitas dengan bebas. Dalam semua kebutuhan hidup manusia harus memiliki stamina yang sehat agar produktivitas seseorang tidak akan terganggu, oleh sebab itu kesehatan merupakan hal yang tidak lepas dari pola hidup manusia itu sendiri. Pemerintah sangat berperan penting atas kebijakan yang seharusnya memperhatikan salah satu hal dalam suatu pembangunan manusia yakni seperti kesehatan, oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikannya dengan serius melalui alokasi anggaran pada sektor kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interpretasi path analysis pada variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan sebesar 0,322 atau pengaruh langsung ($P1$) lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung ($P2 \times P3$) sebesar 1,14, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_0 ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan tahun 2010-2017. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahulauw dan Mahardika (2016) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh sebesar positif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan angka yang positif dengan taraf tingkat kesalahan sebesar 0,05 nilai signifikansinya mencapai

angka 0,0001. Kesimpulannya dalam temuan tersebut bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan menunjukkan angka yang positif.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dalam Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Artinya, setiap tahun pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan Kota Medan setiap tahun meningkat akan tetapi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia diobjek penelitian tahun 2010-2017. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang tidak dipengaruhi indeks pembangunan manusia dikarenakan pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan yang tidak sesuai dengan adanya UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, pengeluaran kesehatan pada tahun 2010-2017 kurang dari 10 persen. Sudah seharusnya pemerintah Kota Medan memikirkan dan mengalokasikan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada tingkat yang pantas atau sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, agar fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati segala golongan bukan hanya golongan atas saja melainkan juga golongan bawah yang sudah sepatutnya sangat menjadi perhatian pemerintah. Ketika kesehatan masyarakat diperhatikan maka sangatlah mungkin tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, masyarakat yang sakit dapat berobat walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Kesehatan merupakan hal yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keadaan tubuh yang sehat masyarakat bisa belajar dan bekerja, maka dengan meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas daya masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan di Kota Medan.

2. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening

Pendidikan adalah salah satu tonggak dalam suatu perekonomian, dengan melalui sistem pendidikan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat terbentuk dengan baik. Pemerintah sangat berperan penting atas dalam suatu pembangunan, salah satunya seperti pembangunan manusia dan meningkatkan produktivitas yang dapat di bentuk melalui dengan adanya pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji interpretasi path analysis pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,626 atau pengaruh langsung (P1) lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung (P2 x P3) sebesar 0,116, sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a ditolak H_o diterima. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Kota Medan selama tahun 2010-2017.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan dari tahun 2010-2017. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Baeti (2013), Astri dkk (2013) dan Kahang (2016), yang mengatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini mungkin terjadi, karena pada periode tahun pengamatan penelitian tersebut, anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan alokasi pengeluaran ataupun belanja pemerintah lainnya.

Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang dalam pembangunan suatu daerah. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan terealisasi dengan tepat sasaran hal ini terlihat dari karena lebih 20% dari total belanja daerah di sektor pendidikan.

Diharapkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi supaya mampu terealisasikan kesemua dengan baik pada bagian sektor pendidikan sehingga tingkat indeks pembangunan manusia di Kota Medan dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih besar di Kota. Dengan adanya pendidikan yang semakin baik maka akan memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sehingga pendidikan bisa dinikmati bukan hanya pada golongan atas melainkan juga masyarakat kalangan bawah. Pemerintah merupakan instrumen kunci kebijakan yang sudah seharusnya sangat memperhatikan hal pokok dalam proses pembangunan ekonomi, melalui ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas tersebut nantinya akan pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia sejahtera. Dengan begitu akan mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi masalah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, output agregat dari barang dan jasa dan PDRB suatu daerah yang secara otomatis dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pendapatan bagi negara atau wilayah serta akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di Kota Medan yang menjadi salah satu indeks komposit dalam penghitungan IPM.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan.
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan, artinya peningkatan indeks pembangunan manusia akan secara langsung menaikkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan secara signifikan. Sebab dalam IPM terhadap indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks kelayakan hidup, sehingga IPM adalah salah satu indikator mengapa sebuah kota dapat meningkatkan sumber daya manusia yang baik.
5. Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan secara Analisis Jalur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia.
6. Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan secara Analisis Jalur tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah untuk lebih menentukan program prioritas dalam peningkatan IPM maupun laju pertumbuhan ekonomi tidak harus meningkatkan nilai belanja kesehatan maupun pendidikan secara global karena proporsi biaya tidak langsung seperti belanja pegawai dan pembangunan prasarana fisik tidak berpengaruh secara nyata.
2. Diharapkan agar bisa menimbulkan efek positif terhadap peningkatan IPM perlu dipilah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maupun sektor pendidikan yang hanya untuk program kegiatan peningkatan IPM dan tidak termasuk belanja untuk gaji dan tidak langsung lainnya.
3. Pada penelitian selanjutnya agar lebih meningkatkan nilai korelasi antar kedua sektor maka jumlah data seriesnya perlu diperbanyak, serta lebih terperinci lagi berdasarkan pengeluaran biaya yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan IPM dan laju pertumbuhan ekonominya.
4. Bagi Pemerintah Kota Medan yang akan datang dituntut lebih meningkatkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat, melalui pengalokasian anggaran pembangunan pendidikan yang besar lagi. Alokasi anggaran pendidikan hendaknya lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan.
5. Untuk Pemerintah Kota Medan hendaknya dapat meningkatkan lagi anggaran belanja daerah sektor kesehatan agar masyarakat dapat merasakan dampak dari fasilitas pelayanan kesehatan Publik berupa tenaga kesehatan yang profesional didukung oleh infrastruktur berupa rumah sakit dan puskesmas.

6. Kepada peneliti selanjutnya supaya melanjutkan penelitian dengan menambah jumlah variabel dan rentang waktu penelitian agar memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abjan. (2016). *Determinasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Barat*. Jurnal. Ternate: Universitas Khairun.
- Adi Widodo, dkk. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.
- Arifin, Y. M., dkk. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Ilmiah. Jember: Universitas Jember.
- Astri, Meylina. (2013). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis.
- Azizah, N. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di PBeberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Fauji, Z. (2017). *Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Fithri. N, David Kaluge. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Habeahan. (2015). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Kahang. M., dkk. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Laisina, C., et al. (2015). *Pengaruh Pegeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmiah.
- Mahyuni. (2013). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Periode 2000-2010*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Muksalmina (2011). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Perubahan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*. Jurnal Ekonomi: Universitas Syiah Kuala.

- Mirza, Danni S. (2012). *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. *Economics Development Analysis Journal*.
- Pratama. Y. M. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016*. *Ilmiah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rafiqi, Sutikno, Wijanarko. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011*. Madurua.
- Saggelorang, M. M. S., dkk. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan*. *Jurnal*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Septiana M.M, Sanggelorang, dkk. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah*.
- Suparno, H. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur*. *Skripsi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Usmaliadanti, S. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2009*.
- Wahid, A. B. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2010*. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Winarti, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012*. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.